ANALISA YURIDIS SANKSI PIDANA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MELAKUKAN PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH DENGAN MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (*ABUSE OF POWER*)

Mariani Wiwik

138040043

ABSTRAK

Pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi negatif, negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran.akibat yang timbul dari sistem ini setiap orang berhak melakukan gugatan terhadap sertifikat tanah tersebut untuk dibatalkan, kemdahan ini cenderung dimanfaatka mafia tanah untuk melakukan pembatalan tanah berkerjasama dengan oknum pejabat BPN oleh karena itu dalam penelitan ini membahas sejauhmana hukum pidana mengatur perbuatan tersebut.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud dari istilah,”pendekatan/*approach*” adalah sesuatu hal atau (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatka, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan mengenai peran hukum pidana dalam penyelesaian pembatalan tanah dengan penyalahgunaan kewenangan,Sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,Analisis data pada penelitian hukum normatif pada hakekatnya adalah kegiatan untukmengadakan ssitematika terhadapbahan-bahan hukum tertulis.

Pemberian sanksi terhadap pejabat BPN/Kepala BPN yang ikut terlibat dalam pembatalan tanah yang tidak sesuai prosedur dan bermain dapat diberikan sanksi pidana serta dengan pemberian sanksi pidana kepada mereka pejabat BPN yang bermain diharapkan dapat menekan jumlah pembatalan tanah yang illegal.

*Kata Kunci : Pembatalan Tanah, Pejabat BPN, Hukum Pidana*

ANALYSIS JURIDICAL CRIMINAL SANCTIONS TO HEAD OFFICE NATIONAL LAND AGENCY ENGAGED WITH CANCELLATION LAND CERTIFICATE ABUSE AUTHORITY (ABUSE OF POWER)

Mariani Wiwik

138040043

ABSTRACT

Registration of land in Indonesia uses a system of negative publicity. In the system of negative publicity, the state only passively accept what is stated by the party requesting pendaftaran.akibat arising from this system, each person entitled to make claims against the land certificate to be canceled, it tends dimanfaatka kemdahan land mafia to make the cancellation of land in collaboration with unscrupulous BPN officials therefore in this research discusses the extent to which the criminal law regulate these actions.

The study used a normative juridical approach. The purpose of the term, "the approach" is something or (deed or enterprise) approach. Specifications of the research is descriptive analytical method that draws on the role of criminal law in the resolution of the cancellation of land with abuse of power, sources of research in the study the primary legal materials and secondary legal materials, data analysis on normative legal research is intrinsically for held some activities systemation concerning to materials written law.

Sanctions against officials BPN / Head of BPN were involved in the cancellation of land which is not in accordance with procedures and play can be given criminal sanctions as well as the provision of criminal sanctions to those officials who play BPN is expected to reduce the number of illegal cancellation of the land.

*Keyword: Cancellation of Land, BPN Officer, Criminal Law*